

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm.116
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi 2). Salemba Empat, Jakarta
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- H. Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, v. 2 (Citra Aditya Bakti, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=QAUgMwEACAAJ>.
- H.R. Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2006
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2005
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 128.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Soeharnoko, dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, hlm. 8-9.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan bYuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990
- Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, 4th ed. (Yogyakarta: BPFE, 2001). Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009
- T. Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Gramedia, 1988), <https://books.google.co.id/books?id=eHjOntzC-LwC>.

## **B. Jurnal**

- Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justusia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Guntara, I. M. A., & Griadhi, N.M.A.Y. (2017). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(8), 1-15
- Lubis, A. F. (2010). *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penjaminan Pada Perum Jamkrindo*. Universitas Indonesia: Jakarta
- Mamonto, W. (2018). Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut UU No. 4 Tahun 1996. Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, 6 (4).
- Nopitayuni, N., & Sukerti, N. (2016). *Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(1).
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

Wardani, P., Rudy, D., & Wiryawan, I, 2013, Implementasi Prinsip Kehatihan Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas, Vol.01, No.08, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.5.

Yustisia, A. R., Permadi, I., Andrijani, I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

### **C. Dokumen**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>

Laporan Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2017-2018, <http://www.depkop.go.id/data-umkm>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 99/PMK.010/2011.

Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah, *Pengkajian Bidang Ekonomi tentang Dilema Investasi dan Resiko Politik Keuangan Dearah: Kajian terhadap UU No. 33 tahun 2004*, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat jenderal Perwakilan Derah RI, Jakarta, 2009, hlm. 35.

Standar Operasional Prosedur Divisi Penjaminan PT. Jamkrida Riau

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 20, LN No. 93 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, TLN No. 4688, Ps. 1 angka 1.

### **D. Internet**

Website Dewan Perwakilan Rakyat, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2020

Portal

Berita

Okezone,

<https://economy.okezone.com/read/2019/06/19/320/2068296/umkm-sumbang-rp8-400-triliun-ke-perekonomian-nasional-pada-2018>

